



Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program BUMDes Untuk Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi

Usep Anwar Nurulloh¹ Fathin Anjani Hilman¹

¹Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : usepanwarnurullob@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis realitas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, proses pemberdayaan ekonomi, dan hasil dari pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh BUMDes Amanah Mandiri. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori pemberdayaan (Mardikanto, 2013). Hasil penelitian ini menunjukkan tiga poin utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat: *pertama*, program BUMDes Amanah Mandiri melibatkan berbagai tahap, menghasilkan pemberdayaan ekonomi berupa UMKM permen jahe mandiri. *Kedua*, proses pemberdayaan melibatkan pendekatan binaan kepada masyarakat dalam berbagai aspek. *Ketiga*, melalui BUMDes Amanah Mandiri, mayoritas masyarakat Desa Cipanas menjadi lebih aktif, kreatif, produktif, dan mandiri dalam mengelola ekonomi mereka, menunjukkan peran penting BUMDes dalam meningkatkan ekonomi mandiri di wilayah tersebut.

Kata Kunci : BUMDes; Pemberdayaan Ekonomi; Kemandirian.

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the reality of community economic empowerment, the process of economic empowerment, and the outcomes of community economic empowerment by BUMDes Amanah Mandiri. The research method employed is qualitative. The results of this study reveal three main points: First, the BUMDes Amanah Mandiri program involves various stages, resulting in economic empowerment in the form of independent ginger candy micro-businesses (UMKM permen jahe mandiri). Second, the economic empowerment process encompasses a comprehensive community development approach. Third, through BUMDes Amanah Mandiri, the majority of the Cipanas Village community becomes more active, creative, productive, and self-reliant in managing their economy, highlighting the significant role of BUMDes in enhancing local self-reliant economics.

Keywords: BUMDes; Economic Empowerment; Community Development.

PENDAHULUAN

Meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah tujuan pembangunan setiap negara, dan hal ini juga berlaku untuk Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, semua potensi alam harus dimanfaatkan, dikembangkan, dan dioptimalkan. Ini juga berlaku untuk potensi manusia, yang terdiri dari populasi yang besar, yang membutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan agar mereka dapat menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal. Meningkatnya permintaan yang dapat dipenuhi menunjukkan peningkatan tingkat kesejahteraan. Setiap komunitas memiliki sumber daya dan potensi yang dapat digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Akibatnya, pembangunan masyarakat menghasilkan keseimbangan yang baik antara kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang ada.

Sebagai bagian dari proses pembangunan, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan kemandirian kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami situasi kemiskinan. Pembangunan dan pemberdayaan adalah aspek yang sangat krusial, dan dalam konteks kemajuan dan transformasi negara, saat ini terdapat kekurangan dalam kapasitas masyarakat Indonesia yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Upaya pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan martabat dan status sosial semua segmen masyarakat dalam situasi saat ini. Hal ini dilakukan dengan pemahaman bahwa keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan tidak selalu merupakan pilihan yang realistik. Dengan kata lain, pemberdayaan kelompok memungkinkan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam upaya menciptakan perubahan yang signifikan. Seperti yang terjadi di Desa Cipanas pertama, sebelum adanya BUMDes Amanah Mandiri, keadaan masyarakat Desa Cipanas yang mayoritas mata pencarhiannya petani memiliki batasan pemasaran dalam memasarkan hasil pertanian dan perkebunannya. Pemasaran tersebut hanya dipasarkan atau di jual disekitar daerah Desa Cipanas saja. Hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan terkait pemasaran sehingga tidak dapat bersaing dengan pasar-pasar online yang mengikuti perkembangan zaman.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program BUMD untuk Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nova Ratna Sikin Rambe (2018)

yang berjudul "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Memberdayakan Masyarakat di Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan". Hasil Penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Bangai Jaya berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Dalam program-programnya, BUMDes memberdayakan masyarakat melalui usaha yang menyediakan alat-alat pertanian dengan cara pembayaran yang dapat dicicil atau diangsur. Perbedaan antara kedua studi ini adalah dalam hal disinsentif. Studi sebelumnya berfokus pada disinsentif dalam implementasi BUMDes. Studi ini, di sisi lain, berfokus pada proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh BUMDes (Rambe, 2018).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Misinta Yunis Dwi Intan R. Abadi (2021) dengan judul "Peran Usaha BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumberrejo Paiton Probolinggo". Dalam hasil penelitiannya dituliskan Hasil penelitian menunjukkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bhakti Raharjo dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sumberrejo, yaitu sebagai salah satu alat pendorong untuk menggali potensi yang dimiliki desa yang kemudian dikelola sebagai program usaha BUMDes Sumberrejo. Studi ini menunjukkan peran program usaha BUMDes. Signifikansi dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana perekonomian masyarakat ditingkatkan dan diperkuat dengan adanya BUMDes. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dapat dilihat dari teori yang digunakan. Jika penelitian sebelumnya hanya berfokus pada teori peran, penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan (Abadi & Dwi, 2021).

Penelitian oleh Khoeron Panji Wiyuda (2020), berjudul Wiyuda, K. P. (2020). Berjudul "Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif Siyasah Maliyah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes Kabul Ciptaku di Desa Longgongsari berpengaruh terhadap peningkatan PADes, mulai dari aset desa berupa tanah dan beberapa unit usaha yang berjalan, seperti agrowisata dan pengelolaan gula yang tidak menunjukkan hasil. Dilihat dari situasi pengelolaannya, PADes di Desa Longgongsari mengalami perkembangan setiap tahunnya, namun hal ini belum berasal dari BUMDes. Saat ini, BUMDes hanya dapat memberikan bantuan dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi masyarakat, seperti membuka akses peningkatan kesempatan kerjadan memfasilitasi promosi hasil usaha masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah hasil yang ingin dicapai. Jika penelitian sebelumnya berfokus pada input yang didapatkan desa dari BUMDes, penelitian ini berfokus pada bagaimana proses pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BUMDes dalam membantu masyarakat dari sisi ekonomi untuk membangun UMKM masyarakat.

Urgensi dari pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sangat penting dalam upaya menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat. Program ini memainkan peran krusial dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa. Dengan memberdayakan warga desa untuk berperan aktif dalam usaha-usaha ekonomi yang berkelanjutan, program BUMDes membantu menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Selain itu, program ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mendukung pengembangan potensi-potensi ekonomi di tingkat desa, yang pada gilirannya memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Peneliti tertarik untuk menjalankan penelitian dengan judul 'Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Bumd Untuk Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi' Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Desa Cipanas.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian mengenai: Program BUMDes Amanah Mandiri di Desa Cipanas, Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes Amanah Mandiri Desa Cipanas, Hasil Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh BUMDes Amanah Mandiri dalam Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi di Desa Cipanas.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan melihat fenomena. Peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan serta mencatat tingkah laku yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di BUMDes Amanah Mandiri. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan langsung dari situasi yang sedang diamati.

Dalam penelitian ini penulis berusaha menggambarkan dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, tinjauan pustaka, dan pengamatan di lapangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penulis ingin melihat proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program badan usaha milik desa untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi

LANDASAN TEORITIS

Pemberdayaan merujuk kepada konsep *empowerment* yang berarti memberdayakan individu atau masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki. Ini melibatkan delegasi kekuasaan dan pemberian wewenang kepada individu atau kelompok masyarakat sehingga mereka mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan ini memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa. Begitupun ada berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu yang berbeda-beda adapun yang memiliki kesamaan dan dijadikan ciri khas antar kelompoknya (Nisa & Anwar, 2020).

Pemberdayaan mencakup kesadaran masyarakat tentang hak, tanggung jawab, aspek politik, ekonomi, dan budaya mereka. Dengan begitu, pemberdayaan menjadi upaya kelompok masyarakat untuk meningkatkan martabat dan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan dan masalah yang timbul. Dasar dari pendekatan ini adalah keyakinan bahwa setiap komunitas memiliki kapasitas yang mungkin belum sepenuhnya dimanfaatkan atau ditingkatkan (Ridwanullah & Herdiana, 2018).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Ini juga mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan. Proses pemberdayaan melibatkan persiapan, identifikasi kebutuhan dan masalah, perencanaan program, formulasi rencana aksi, pelaksanaan, evaluasi, dan terminasi. Selama proses ini, masyarakat harus bekerjasama, berkolaborasi, dan memiliki mekanisme pengawasan yang transparan (Habib, 2021).

Indikator pemberdayaan mencakup kesadaran dan motivasi untuk berubah, kemampuan untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan untuk menghadapi hambatan, dan kemampuan untuk berkolaborasi dan membangun solidaritas. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi dapat diukur dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin, peningkatan usaha peningkatan pendapatan, kemandirian kelompok, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemerataan pendapatan.

Pemberdayaan adalah upaya untuk mengangkat kualitas hidup dan kemandirian individu dan masyarakat, sehingga mereka dapat aktif mengambil peran dalam pembangunan dan perubahan sosial yang positif. Ini merupakan elemen kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Menurut Aziz (2010), pemberdayaan dalam konteks sosiologi mencakup

mengaktifkan serta menggalang peran aktif dan kerja sama antara masyarakat dan pihak mitra.

Terdapat berbagai definisi ekonomi yang memberikan gambaran tentang pengertian dan peran ekonomi dalam kehidupan manusia. Kata “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani kuno, “oikonomia,” yang terdiri dari dua bagian, yaitu “oikos” yang berarti rumah tangga atau tempat tinggal, dan “nomos” yang berarti aturan atau manajemen. Secara harfiah, “oikonomia” dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Para ahli ekonomi telah memberikan berbagai definisi tentang konsep ekonomi. Salah satu tokoh penting dalam ekonomi, mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan fokus pada sebab-sebab material dari kemakmuran seperti hasil industri dan pertanian (Hasanah, 2020).

Alfred Marshall (menggambarkan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari usaha individu dalam kehidupan sehari-hari, dengan fokus pada cara individu memperoleh dan menggunakan pendapatan mereka. Menurut Abraham Maslow, ekonomi merupakan bidang studi yang mencoba menyelesaikan masalah kebutuhan dasar manusia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dengan berlandaskan prinsip dan teori tertentu dalam sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien (Sumanto, 2014).

Melalui berbagai pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah bidang ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik secara individu maupun dalam kelompok, dengan menggunakan berbagai sarana dan fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, dengan tujuan mencapai kesejahteraan atau kemakmuran (Rahman, 2017).

Pengertian masyarakat juga memegang peran penting dalam konteks ekonomi. Masyarakat adalah kelompok manusia yang tinggal bersama dalam satu tempat untuk waktu yang lama dan menyadari bahwa mereka adalah bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar. Masyarakat juga terlibat dalam sistem kehidupan bersama dan terikat oleh aturan sosial yang mengatur interaksi dan perilaku anggotanya. Berdasarkan definisi para ahli, masyarakat dapat diartikan sebagai kesatuan sosial yang memiliki ikatan kasih sayang yang kuat dan unsur-unsur yang saling memengaruhi. Masyarakat dapat mencakup berbagai tingkatan, dari keluarga hingga kelompok sosial yang lebih besar, yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama (Pandaleke dkk, 2020).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah salah satu bentuk program pemberdayaan yang berfokus pada usaha memberdayakan ekonomi masyarakat.

Konsep ini melibatkan tiga pendekatan penting, yaitu pendekatan yang ditujukan langsung kepada mereka yang membutuhkan, pendekatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dan pendekatan kelompok, yang dianggap efektif dalam penggunaan sumber daya dan efisiensi.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melibatkan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan ekonomi masyarakat, terutama yang berada dalam kelompok yang rentan atau kurang mampu. Tujuan dari pemberdayaan ekonomi adalah agar masyarakat dapat mengambil peran aktif dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kemandirian ekonomi mereka, dan meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat mencakup pemberian akses, pelatihan, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan agar masyarakat dapat mengembangkan keterampilan, usaha, dan pengambilan keputusan ekonomi (Asfi & Wijaya, 2015).

Selain itu, bina kelembagaan juga merupakan komponen penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kelembagaan mencakup beragam organisasi, kelompok, dan struktur yang mendukung dan memfasilitasi upaya pemberdayaan ekonomi. Kelembagaan adalah sistem kerja dan prosedur, otoritas, dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya. Kelembagaan dapat mencakup pemerintah lokal, organisasi non-pemerintah (NGO), koperasi, lembaga keuangan, dan berbagai kelompok masyarakat seperti asosiasi petani, perkumpulan wanita, dan kelompok kerajinan tangan.

Pentingnya kelembagaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah karena kelembagaan dapat memberikan bimbingan, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan untuk masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi mereka. Misalnya, pemerintah lokal dapat menyediakan akses ke pasar, pelatihan, dan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan menengah. Organisasi non-pemerintah dapat memberikan advokasi dan sumber daya untuk sektor-sektor tertentu seperti pertanian berkelanjutan atau industri kerajinan tangan. Koperasi dapat memungkinkan masyarakat untuk bersatu dan berinvestasi bersama dalam bisnis kolektif (Bahri, 2019).

Kelembagaan juga dapat berperan dalam menciptakan aturan dan regulasi yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk perlindungan hak-hak properti, peraturan bisnis yang adil, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Selain itu, kelembagaan dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kebijakan ekonomi dan sosial di tingkat lokal dan

nasional.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan kelembagaan yang kuat dan inklusif menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan bantuan kelembagaan yang tepat, masyarakat dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mereka, memperluas akses ke peluang ekonomi, dan memperjuangkan kepentingan mereka dengan lebih efektif dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Rahman dkk, 2023).

Pentingnya bina kelembagaan terlihat dalam pengembangan berbagai aspek pemberdayaan, seperti bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Kelembagaan memberikan landasan untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga berkaitan erat dengan konsep pemberdayaan kemandirian ekonomi masyarakat. Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya, mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan mereka (Gunawan dkk, 2020).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga mencakup konsep pemberdayaan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi masyarakat dalam mengelola sumber daya, mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini melibatkan memberikan alat, pengetahuan, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan kepada individu dan kelompok masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi mereka sendiri (Amalia & Syawie, 2015).

Pemberdayaan kemandirian ekonomi masyarakat menciptakan kesempatan bagi individu dan kelompok masyarakat untuk memulai usaha mereka sendiri, seperti bisnis kecil dan menengah, pertanian, kerajinan tangan, dan sektor-sektor lain yang sesuai. Ini dapat melibatkan pelatihan dalam manajemen bisnis, pendanaan, akses pasar, dan penggunaan teknologi yang relevan. Dengan memberdayakan kemandirian ekonomi, masyarakat dapat menjadi agen perubahan dalam pembangunan ekonomi mereka sendiri, yang pada gilirannya akan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dan lebih banyak mengendalikan masa depan ekonomi mereka sendiri (Rozalinda, 2014).

Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang mandiri memiliki kemampuan untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat, memanfaatkan peluang ekonomi, dan mencapai kesejahteraan mereka sendiri. Dengan demikian, konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat mencakup pemahaman dan upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dan meningkatkan kemandirian mereka.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, penting untuk memperhatikan konsep bina kelembagaan. Kelembagaan berperan penting dalam menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi. Kelembagaan mencakup berbagai organisasi, struktur, dan mekanisme yang membantu mengkoordinasikan dan mengelola upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat (Ulum & Anggaini, 2020).

Mengenai konsep bina kelembagaan, hal ini mencakup pembentukan dan pengembangan berbagai organisasi dan kelompok yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini termasuk pembentukan badan usaha, pengembangan organisasi yang jelas, serta pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia. Melalui kelembagaan yang kuat, masyarakat dapat lebih efektif mengorganisir sumber daya dan upaya mereka untuk mencapai tujuan ekonomi (Subekti dkk, 2018).

Ketiga konsep ini, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberdayaan kemandirian ekonomi masyarakat, dan bina kelembagaan, saling terkait dan saling mendukung dalam upaya mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan memahami konsep-konsep ini secara holistik, kita dapat merancang program pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi.

Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Dalam konteks pemerintahan desa, terdapat sejumlah prinsip dan landasan pemikiran yang mendasari pemahaman tentang desa, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (Ferdianto, 2016).

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah sebuah institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mengelola ekonomi dan usaha yang dibutuhkan oleh desa tersebut. BUMDes berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan disepakati oleh masyarakat desa. UU No. 6/2014 tentang Desa mendefinisikan BUMDes sebagai badan usaha yang dimiliki sebagian besar atau seluruhnya oleh desa dan dijalankan dengan modal yang berasal dari kekayaan

desa yang terpisah (Agunggunanto dkk, 2016).

BUMDes diwujudkan sebagai strategi kebijakan untuk membangun ekonomi dari tingkat desa, dengan fokus pada pengembangan usaha ekonomi yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 juga menjelaskan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang didirikan oleh pemerintah desa dan dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Dengan demikian, BUMDes dapat diartikan sebagai sebuah entitas yang berperan dalam mengelola aspek ekonomi desa dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat desa. BUMDes juga berfungsi sebagai lembaga yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan desa. Fungsi BUMDes meliputi peningkatan pendapatan desa dengan mengumpulkan tabungan dalam skala lokal melalui pengelolaan dan simpan pinjam, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan pengembangan unit usaha untuk mendayagunakan potensi ekonomi desa (Hartati dkk, 2023).

Adapun tujuan BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Pendirian BUMDes juga memerlukan pemrakarsa yang dapat menggerakkan inisiatif dalam pendirian BUMDes, yang seringkali diwakili oleh kepala desa. Faktor-faktor seperti potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam desa, sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola BUMDes, serta permodalan juga harus dipertimbangkan dalam pendirian BUMDes.

BUMDes memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat desa. BUMDes membantu meningkatkan kemandirian ekonomi desa, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kepemilikan bisnis, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha, memberikan akses pembiayaan dan sumber daya, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di tingkat desa (Aribowo & Sari, 2023).

Dengan demikian, BUMDes bukan hanya berperan dalam mengelola ekonomi desa, tetapi juga menjadi lembaga pemberdayaan yang mendorong

perkembangan dan kesejahteraan masyarakat desa. Kemandirian merujuk pada kemampuan individu atau suatu sistem untuk bertindak, berpikir, dan mengambil keputusan secara mandiri tanpa tergantung pada orang lain atau faktor eksternal. Kemampuan ini mencakup pengaturan diri, pemecahan masalah, inisiatif, dan tanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan pribadi. Dalam konteks ekonomi, kemandirian ekonomi adalah kemampuan seseorang atau masyarakat untuk mengatur, memenuhi, dan tidak tergantung pada orang lain dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Aspek kemandirian mencakup kemandirian emosional, kemandirian tingkah laku, dan kemandirian nilai. Kemandirian emosional melibatkan perubahan dalam hubungan emosional individu, kemandirian tingkah laku melibatkan kemampuan membuat keputusan dan bertindak secara bertanggung jawab, sementara kemandirian nilai melibatkan kemampuan memaknai prinsip tentang benar dan salah serta apa yang dianggap penting atau tidak (Djafri, 2017).

Kemandirian juga berkaitan dengan tanggung jawab, otonomi, inisiatif, dan kontrol diri. Ini termasuk kemampuan untuk memikul tanggung jawab, mengendalikan diri, mengambil inisiatif, dan menjaga kendali terhadap tindakan dan emosi.

Kemandirian juga dapat dilihat dari ciri-ciri individu atau masyarakat yang mencakup kemampuan mengambil inisiatif, kemampuan mengatasi masalah, ketekunan, dan kepuasan dari usaha yang mereka lakukan. Faktor internal dan eksternal memengaruhi kemandirian seseorang. Faktor internal melibatkan motivasi dan kebutuhan pribadi individu, sementara faktor eksternal meliputi budaya dan pola asuh. Kebudayaan masyarakat yang kompleks dan maju dapat membentuk kemandirian yang lebih tinggi, sedangkan pola asuh yang demokratis, otoriter, atau bebas akan mempengaruhi perkembangan kemandirian individu (Aziz, 2018).

Dengan demikian, kemandirian ekonomi seseorang atau masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, serta aspek kemandirian yang mencakup emosional, tingkah laku, dan nilai-nilai yang dianut. Kemandirian ekonomi adalah bagian penting dalam mencapai otonomi dan kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi di tingkat desa. BUMDes adalah wadah yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelola aset, menyediakan layanan, dan menjalankan berbagai bisnis sesuai dengan kebutuhan dan potensi ekonomi desa. Program ini telah menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam meningkatkan pendapatan asli desa, menciptakan peluang kerja, serta memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi lokal.

Melalui program BUMDes, masyarakat desa memiliki kesempatan untuk mengatur, mengelola, dan mengambil keputusan dalam mengembangkan usaha mereka sendiri. Hal ini membantu mereka untuk menjadi lebih mandiri dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, termasuk memenuhi kebutuhan dasar, membangun aset, dan meningkatkan taraf hidup. Kemandirian ekonomi yang diperoleh melalui program BUMDes juga menciptakan dampak positif pada tingkat desa secara keseluruhan, seperti peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), pemberdayaan sosial masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan akan membahas lebih lanjut tentang dampak dan manfaat program BUMDes dalam menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Program BUMDes Amanah Mandiri di Desa Cipanas

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti BUMDes Amanah Mandiri di Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur adalah contoh konkret dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat setempat. BUMDes merupakan badan usaha yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia yang bertujuan untuk mengelola aset dan sumber daya lokal demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa (Surono, 2017). Pendirian BUMDes, seperti BUMDes Amanah Mandiri, mencerminkan respons terhadap tantangan ekonomi, seperti wabah COVID-19, yang memengaruhi pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan upaya partisipatif dan pemecahan masalah lokal (Efendi, 2022).

Teori pemberdayaan masyarakat yang relevan dalam konteks ini adalah teori pemberdayaan partisipatif. Prinsip-prinsip teori ini menggarisbawahi pentingnya melibatkan masyarakat dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program pemberdayaan (Zahruddin dkk, 2023). BUMDes Amanah Mandiri secara aktif melibatkan masyarakat Desa Cipanas dalam proses

perencanaan dan implementasi program-program ekonomi. Program yang dipilih, seperti pengolahan jahe menjadi permen, didasarkan pada identifikasi kebutuhan dan potensi lokal yang telah melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Proses ini membantu meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya ekonomi.

Selain itu, tahapan-tahapan yang diterapkan oleh BUMDes Amanah Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi, mulai dari persiapan, identifikasi kebutuhan, perencanaan program, formulasi rencana aksi, pelaksanaan program, evaluasi, hingga terminasi, juga sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat (Fitri, 2022). Hal ini mencakup pemahaman akan pentingnya persiapan yang matang, pengidentifikasi masalah lokal, perencanaan program berdasarkan kebutuhan, pengadaan dana untuk pelaksanaan program, pelaksanaan program dengan melibatkan masyarakat, evaluasi berkelanjutan, dan pelepasan yang bertahap (Cahyati, 2021).

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes, kunci keberhasilan terletak pada pemberdayaan masyarakat dengan memberikan mereka alat, pelatihan, dan dukungan yang diperlukan untuk mandiri dalam mengatasi permasalahan ekonomi (Habib, 2021). Melalui pengelolaan sumber daya lokal, seperti pengolahan jahe, BUMDes Amanah Mandiri mampu memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat Desa Cipanas, menciptakan peluang kerja, dan membantu mengatasi tantangan ekonomi akibat wabah COVID-19. Program-program seperti ini mengikuti pendekatan partisipatif dan berkelanjutan yang merupakan pilar utama dalam teori pemberdayaan masyarakat.

Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes Amanah Mandiri Desa Cipanas

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan yang berfokus pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) menjadi salah satu faktor penting dalam upaya ini, seperti yang diilustrasikan melalui BUMDes Amanah Mandiri di Desa Cipanas. Tujuan BUMDes ini adalah untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi, sesuai dengan latar belakang pendidikan dan visi yang dimiliki oleh para pengurusnya (Anshori, 2019).

Latar belakang pendidikan para pengurus BUMDes, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan, memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam mengelola program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendidikan ini membantu mereka memahami konsep-konsep ekonomi, pengembangan daerah,

dan pemberdayaan masyarakat, yang relevan dalam operasional BUMDes (Fauziah, 2020).

BUMDes Amanah Mandiri menitikberatkan pada aspek pemberdayaan ekonomi melalui beberapa pendekatan, yang sejalan dengan teori pemberdayaan Mardikanto (Yusuf, 2020). Pendekatan pertama adalah bina manusia, yang mencakup pelatihan penggunaan teknologi elektronik untuk mencegah penipuan dan memanfaatkan perkembangan zaman modern. Bina manusia adalah komponen penting dalam pemberdayaan, mengingat bahwa pembangunan bertujuan untuk perbaikan kualitas hidup manusia (Fithri, 2020).

Selanjutnya, pendekatan bina usaha berfokus pada pengembangan usaha seperti UMKM Permen Jahe Mandiri. Ini mencakup pembiayaan terjangkau dan strategi pemasaran efektif, yang berkontribusi pada peningkatan nilai ekonomis masyarakat melalui produk-produk lokal.

Pendekatan bina lingkungan dalam konteks ini bukan hanya tentang menjaga lingkungan, tetapi juga memanfaatkannya dengan tanaman, sayuran, dan buah-buahan yang menghasilkan nilai ekonomis. Dalam hal ini, BUMDes mendorong masyarakat untuk menanam jahe dan mengolahnya menjadi produk seperti permen jahe. Ini merupakan langkah menuju pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi (Octavia dkk, 2020).

Terakhir, pendekatan bina kelembagaan memastikan bahwa usaha-usaha ini berjalan sesuai aturan dan hukum. BUMDes sebagai lembaga resmi berperan penting dalam mengatur aspek kelembagaan dan memberikan jaminan hukum terhadap usaha yang melibatkan masyarakat (Aam, 2023).

Dalam proses pemberdayaan ekonomi, muncul beberapa tantangan, terutama terkait partisipasi masyarakat. Meskipun program pemberdayaan ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, beberapa masalah seperti kurangnya semangat partisipasi dan peralatan yang tidak memadai dapat menjadi hambatan. Oleh karena itu, pendekatan bertahap dan pendekatan komunitas digunakan untuk mencapai keterlibatan yang lebih besar (Hajar dkk, 2018).

Dengan pendekatan yang tepat, BUMDes Amanah Mandiri berhasil mengubah pola pikir dan meningkatkan kemandirian masyarakat Desa Cipanas, terutama di Dusun 4 Kampung Babakan Sirnasari RW 14. Masyarakat menjadi memiliki UMKM mereka sendiri, yang menggambarkan kesuksesan pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan teori pemberdayaan Mardikanto. Evaluasi berkala juga memastikan perkembangan yang berkelanjutan dalam

program-program pemberdayaan tersebut.

Hasil Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh BUMDes Amanah Mandiri dalam Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi di Desa Cipanas

Masyarakat Desa Cipanas memiliki peran penting dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes Amanah Mandiri. Teori Pemberdayaan menekankan bahwa pemberdayaan sejati terjadi ketika masyarakat menjadi subjek aktif dalam mengambil peran dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam kasus ini, masyarakat Desa Cipanas bukan hanya menjadi objek pasif program pemberdayaan, tetapi mereka juga menjadi pengambil keputusan dan pelaksana inisiatif mereka sendiri. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam Teori Pemberdayaan (Hadi, 2010).

Kepentingan masyarakat sebagai subjek dalam pemberdayaan sangat terlihat ketika masyarakat merespon positif terhadap program-program yang ditawarkan oleh BUMDes Amanah Mandiri. Masyarakat yang masih menjaga tradisi gotong royong memiliki rasa kebersamaan dan keterlibatan dalam program-program pemberdayaan. Mereka terlibat dalam program UMKM Permen Jahe Mandiri dan Bazar UMKM Ramadhan. Respon positif ini menunjukkan bahwa masyarakat aktif terlibat dalam meningkatkan kehidupan ekonomi mereka sendiri.

Selama pandemi COVID-19, masyarakat Desa Cipanas mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Hal ini memperjelas pentingnya pemberdayaan ekonomi. Program-program yang diselenggarakan oleh BUMDes membantu masyarakat menghadapi krisis perekonomian ini. Masyarakat belajar bagaimana menjadi mandiri dalam menjalankan usaha, seperti yang ditekankan dalam Teori Pemberdayaan.

Masyarakat Desa Cipanas tidak hanya menjadi mandiri dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam pemanfaatan teknologi. Mereka menggunakan media online untuk memasarkan produk mereka dan berjualan hingga ke luar desa. Dalam konteks Teori Pemberdayaan, ini mencerminkan peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya mereka secara bijaksana dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan perekonomian mereka (Sudarsana, 2015).

Teori Pemberdayaan, dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi, merupakan pendekatan yang fokus pada peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya mereka dengan bijaksana. Pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan atau solusi jangka pendek, tetapi lebih kepada memberikan alat, pengetahuan, dan pelatihan yang diperlukan

agar masyarakat dapat mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri (Sururi, 2015). Dengan pemberdayaan, masyarakat dapat mengambil kendali atas nasib mereka sendiri, dan hal ini mencakup peningkatan ekonomi melalui penggunaan teknologi yang tepat (Suryo, 2016).

Penggunaan teknologi modern dalam proses pemberdayaan masyarakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian mereka. Teknologi dapat memungkinkan akses lebih baik ke informasi, peluang bisnis, dan pasar global. Dalam era digital yang semakin maju, akses internet dan teknologi informasi dapat memfasilitasi koneksi dengan pelanggan, sumber daya, dan pendanaan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, penggabungan teori pemberdayaan dengan teknologi yang sesuai merupakan langkah kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan ekonomi yang lebih berkelanjutan (Kusuma dkk, 2022).

Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat di Desa Cipanas memperlihatkan penerapan konsep-konsep dari Teori Pemberdayaan. Masyarakat menjadi subjek aktif dalam pemberdayaan mereka, merespon positif terhadap program-program yang ditawarkan, dan menjadi lebih mandiri dalam menghadapi tantangan perekonomian (Abdullah dkk, 2023).

PENUTUP

Tujuan dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk menciptakan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola usaha-usaha ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan pemberian dukungan, pelatihan, dan sumber daya, program BUMDes bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi eksternal. Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh peningkatan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk mencapai keberlanjutan ekonomi di tingkat desa.

Program BUMDes Amanah Mandiri merupakan salah satu program di Desa Ciapanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat yang bernama UMKM Permen Jahe Mandiri dengan tahapan pembentukan program ini melalui tahap persiapan pemilihan lokasi di Dusun 4 Kampung Babakan Sirnasari RW 14, mengidentifikasi permasalahan dan

kebutuhan masyarakat disana, menyusun rencana dalam program pemberdayaan ekonomi bersama masyarakat serta memformulasikan rencana aksi hingga pelaksanaan program, dan diakhiri adanya evaluasi monitoring program terhadap masyarakat sehingga dapat dilepas (terminasi) oleh pengurus BUMDes dalam proses berjalannya kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM Permen Jahe Mandiri. Pihak-pihak yang terlibat berpartisipasi dalam program ini adalah masyarakat Desa Cipanas Dusun 4 Kampung Babakan Sirnasari RW 14, pengurus BUMDes Amanah Mandiri, dan Pemerintahan Desa Cipanas.

Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes Amanah Mandiri Desa Cipanas adalah dengan melakukan pendekatan binaan kepada masyarakat yaitu: Bina Manusia; melalui pendekatan pendidikan, pelatihan, pendampingan dan konsultasi dalam meningkatkan kualitas SDM masyarakat Dusun 4 Kampung Babakan Sirnasari RW 14. Bina Usaha; Memberikan akses pembiayaan dengan pinjaman modal kepada petani jahe mandiri untuk memperluas produksi dan mengatasi kendala finansial. Salah satunya dengan mengembangkan program pinjaman mikro untuk pengusaha kecil dan menengah dalam UMKM Permen Jahe Mandiri. Bina Lingkungan; Proses pendekatan ini yaitu dilakukan dengan pemantauan serta mengevaluasi secara berkala terhadap perkembangan UMKM Permen Jahe Mandiri yang didukung oleh BUMDes. Dalam hal ini diberikan bimbingan kepada masyarakat dalam mematuhi standar produksi dan kualitas yang diterapkan serta dapat memanfaatkan lingkungan sekitar dan tidak merusaknya. Bina Kelembagaan; pendekatan atau pembinaan kelembagaan yang dilakukan oleh BUMDes Amanah Mandiri adalah dengan pemberdayaan komunitas, salah satunya adalah dengan mengadakan kegiatan sosial dan budaya untuk memperkuat rasa kebersamaan dan identitas komunitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keterlibatan dalam proyek-proyek pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pembinaan tersebut menghasilkan masyarakat Dusun 4 Kampung Babakan Sirnasari RW 14 Desa Cipanas menjadi pribadi yang mandiri dan dapat membuka UMKM Permen Jahe Mandiri dibawah naungan BUMDes Amanah Mandiri sebagai penjamin hukum atau aturan perekonomian Desa Cipanas.

Hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh BUMDes Amanah Mandiri dalam menumbuhkan kemandirian ekonomi di Desa Cipanas menunjukkan bahwa dengan adanya BUMDes Amanah Mandiri mayoritas masyarakat Desa Cipanas khususnya Dusun 4 Kampung Babakan Sirnasari RW 14 menjadi pribadi yang aktif, kreatif, produktif, dan mandiri dalam mengatur perekonomiannya melalui program UMKM Permen Jahe Mandiri.

Program BUMDes Amanah Mandiri di Desa Ciapanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui program UMKM Permen Jahe Mandiri. Proses program ini dimulai dengan tahap persiapan, termasuk pemilihan lokasi di Dusun 4 Kampung Babakan Sirnasari RW 14, identifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat, serta penyusunan rencana pemberdayaan ekonomi bersama masyarakat. Program tersebut dilanjutkan dengan memformulasikan rencana aksi dan pelaksanaan program, yang melibatkan aktif partisipasi masyarakat Desa Ciapanas Dusun 4 Kampung Babakan Sirnasari RW 14, pengurus BUMDes Amanah Mandiri, dan Pemerintahan Desa Ciapanas. Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui pendekatan binaan, yang mencakup bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Hasil dari pemberdayaan ini adalah masyarakat yang mandiri, aktif, kreatif, produktif, dan mampu mengelola UMKM Permen Jahe Mandiri dengan sukses di bawah naungan BUMDes Amanah Mandiri, yang menjadi penjamin hukum dan aturan perekonomian Desa Ciapanas. Program ini telah membantu masyarakat Desa Ciapanas meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam, A. (2023). Pemberdayaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Kelompok Di Desa Way Kalam Kecamatan Penengahan Lampung Selatan. *Doctoral Dissertation*, UIN Raden Intan Lampung.
- Abadi, I. R., & Dwi, M. Y. (2021). Peran Usaha BUMDES Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sumberrejo Paiton Probolinggo. *Doctoral dissertation*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Abdullah, S., Astuty Wunawarsih, I., Endah Purwanti, R., Batoa, H., Lasinta, M., Jayadisastra, Y., ... & Nelvi, Y. (2023). *Pengantar Penulisan Pertanian*.
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Amalia, A. D., & Syawie, M. (2015). Pembangunan Kemandirian Desa melalui konsep pemberdayaan: Suatu Kajian dalam perspektif sosiologi. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(2).
- Anshori, M. (2019). Efektivitas Pengelolaan BUMDes Aik Mateng Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. *Doctoral dissertation*.UIN Mataram.
- Aribowo, N. C., & Sari, K. A. (2023). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

- (BUMDES) Lancar Jaya Di Desa Mejing Sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Desa. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(3), 195-205.
- Asfi, N., & Wijaya, H. B. (2015). Efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan pada program gerdu kempling di Kelurahan Kemijen Kota Semarang. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4(2), 253-268.
- Aziz, A. (2018). Hubungan Antara Kompetensi Guru Dan Kepercayaan Diri Dengan Kemandirian Siswa SMP N 2 Pangkalan Susu. *Jurnal Psychomutira*, 1(1), 15-29.
- Aziz, R. (2010). Dakwah Dalam Paradigma Pemberdayaan Masyarakat Muslim. *Ilmu Dakwah: Academic Journal For Homiletic Studies*, 5(16), 117-144.
- Bahri, E. S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. FAM Publishing.
- Cahyati, S. R. (2021). Sekolah Perempuan Capai Impian Dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) Melalui Program Life Skill Dalam Meningkatkan Kemandirian (Studi pada Program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Tasikmalaya). *Doctoral dissertation*. Universitas Siliwangi.
- Djafri, N. (2017). *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah: (Pengetahuan Manajemen, Efektivitas, Kemandirian Keunggulan Bersaing dan Kecerdasan Emosi)*. Deepublish.
- Efendi, A. (2022). Strategi pengelolaan badan usaha milik desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sukaraja Jerowaru Lombok Timur. *Doctoral dissertation*. UIN Mataram.
- Fauziah, S. M. (2020). Peran Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. *Doctoral dissertation*. IAIN Ponorogo.
- Ferdianto, B. (2016). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Fithri, B. S. (2020). Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika.
- Fitri, Z. A. K. (2022). Analisis pendapatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program desa wisata perspektif syariah: studi kasus pada Desa Wisata Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Doctoral dissertation*. UIN Mataram.
- Gunawan, N. S., Widowati, N., & Maesaroh, M. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kampung Sayur Organik Desa Di Desa Ngemplak Sutan, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta/82/Adm. Publik/2020 . *Doctoral dissertation*. Faculty of Social and

- Political Science.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 82-110.
- Hadi, A. P. (2010). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA).
- Hajar, S., Tanjung, I. S., & Tanjung, Y. (2018). Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir. *Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI*.
- Hartati, P., Amirulloh, M., & Munandar, E. (2023). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kompromi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Bojongkondang Kecamatan Langkaplanchar Kabupaten Pangandaran. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(4), 630-640.
- Hasanah, M. (2020). Laporan Penelitian Upaya Meningkatkan Kecerdasan Ekologis Melalui Komik Edukasi Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Banjar Sebagai Sumber Belajar Ekonomi.
- Kusuma, V. A., Sahabuddin, Z. A., & Hutasoit, P. S. (2022). Strategi digital marketing pada usaha mikro dan menengah (UMKM) di masa pandemi Covid-19 melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi rakyat. *Jurnal cafetaria*, 3(1), 24-35.
- Nisa, M., & Anwar, S. (2020). Efektivitas Keluarga Utama Berakhlaql Karimah Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(3).
- Octavia, D., Yeny, I., & Ginoga, K. L. (2020). *Pengelolaan butan secara partisipatif menuju KPH hijau untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan*. Deepublish.
- Pandaleke, T. F., Koagouw, F. V., & Waleleng, G. J. (2020). Peran komunikasi sosial masyarakat dalam melestarikan bahasa daerah pasan di Desa Rasi Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(3).
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461-1471.
- Rahman, M. (2017). *Ilmu administrasi* (Vol. 1). Sah Media.
- Rambe, N. R. S. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Memberdayakan Masyarakat di Desa Bangai Kecamatan Torgamba

- Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
- Ridwanullah, A. I., & Herdiana, D. (2018). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid. *Ilmu Dakwah: Academic Journal For Homiletic Studies*, 12(1), 82-98.
- Rozalinda, R. (2014). Peran wakaf dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 2(1), 39-62.
- Subekti, P., Setianti, Y., & Hafiar, H. (2018). Pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan hidup di desa margalaksana kabupaten bandung barat. *Jurnal Kawistara*, 8(2), 148-159.
- Sudarsana, I. K. (2015). Peningkatan mutu pendidikan luar sekolah dalam upayapembangunan sumber daya manusia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(1), 1-14.
- Sumanto, M. A. (2014). Psikologi Umum. Media Pressindo.
- Surono, A. (2017). Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 459-478.
- Sururi, A. (2015). Pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanatasalam Kabupaten Lebak. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 3(2).
- Suryo, H. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kemandirian Masyarakat. *Transformasi*, 1(29).
- Ulum, M. C., & Anggaini, N. L. V. (2020). *Community Empowerment: Teori dan Praktik Pemberdayaan Komunitas*. Universitas Brawijaya Press.
- Wiyuda, K. P. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif Siya> Sah Ma> Liyah (Studi Di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas). *Doctoral dissertation*. IAIN.
- Yusuf, M. Y. (2020). Pemberdayaan Mustahik Zakat Melalui Program Gampong Produktif di Baitul Mal Aceh.
- Zahruddin, A., Hariyono, R. C. S., Syifa, F. F., Al Syarief, S. W., & Idris, N. (2023). Pemberdayaan Program Pelatihan Bumdes Dalam Mengembangkan Perekonomian Desa. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 7771-7778.

